



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, maka indikator kinerja utama yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemeentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2...

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU:

- a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan acuan dalam:
 - a. menetapkan rencana Kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun laporan akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan Daerah tahun 2024-2026.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Kinerja, perbaikan Kinerja, dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah serta disampaikan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
- (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap Kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. memantau kemajuan pencapaian Kinerja.
- (3) Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar perbaikan dan penerapan manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks
2	Indeks Pendidikan	indeks
3	Indeks Kesehatan	indeks
4	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks
5	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen
7	Indeks Kesalehan Sosial	indeks
8	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	indeks
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen
11	Persentase Penduduk Miskin	persen
12	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, dan Perikanan	persen
13	Persentase Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	persen
14	Persentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	persen
15	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen
16	Indeks Desa Membangun	indeks
17	Indeks Ketahanan Pangan	indeks
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen
19	Persentase PPKS yang Berdaya	persen
20	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks
21	Nilai SAKIP	point
22	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	indeks
23	Opini BPK	opini
24	Indeks Profesionalitas ASN	indeks
25	Maturitas SPIP Terintegrasi	point
26	Indeks SPBE	indeks
27	Indeks Pelayanan Publik	indeks
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks
29	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Persen
30	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	persen
31	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	point
32	Rasio Konektivitas Kabupaten	point
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks
34	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	indeks

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Setda
Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda
Meningkatnya Kinerja Fasilitasi rapat-rapat Sekretariat DPRD yang tepat waktu	Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu	Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat yang direncanakan	Setwan
	Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya	Jumlah Rancangan Perda dibagi jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi	Setwan
	Prosentase penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui SIPD	Jumlah aspirasi yang disampaikan DPRD dibagi jumlah seluruh anggota DPRD	Setwan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	Setwan
	Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai evaluasi SPIP hasil QA BPKP	Inspektorat
Meningkatnya Sistem Pengawasan dan	Nilai Maturitas SPIP	Nilai evaluasi SPIP hasil QA BPKP	Inspektorat

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Pengendalian Internal yang Efektif			
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai evaluasi MRI hasil QA BPKP	Inspektorat
	Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK)	Nilai evaluasi IEPK hasil QA BPKP	Inspektorat
	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Evaluasi APIP Hasil QA BPKP	Inspektorat
Meningkatnya tata kelola dan integritas aparatur Inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP	Inspektorat
Meningkatnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Rumus perhitungan IKF setara dengan $IKF = 1 - \frac{\text{Realisasi Non-PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$	BAPENDA
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai AKIP	BAPENDA
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata rata dari persentase ketepatan pengalokasian anggaran belanja (belanja kesehatan, belanja pendidikan, infrastruktur, APIP dan Pelatihan) , ketepatan penyusunan APBD, kesesuaian waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kecepatan dan ketepatan dokumen pencairan, ketepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana pencairan	BPKAD
Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Presentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Rata rata dari Persentase capaian pengamanan aset daerah, Persentase pemanfaatan barang milik daerah yang	BPKAD

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		digunausahakan	
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD	Nilai AKIP BPKAD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BPKAD
Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas AS	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM
Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	Nilai Indeks Sistem Merit	BKPSDM
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap LKIP BKPSDM berupa bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja BKPSDM	BKPSDM
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan dan pengukuran Kinerja	Jumlah Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	BAPPEDA
Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pembangunan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dalam SAKIP	BAPPEDA
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam SAKIP	BAPPEDA
Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan	Hasil kelitbangan yang menjadi kebijakan (dalam bentuk Perbup/program/kegiatan)	BAPPEDA
	Persentase Inovasi Daerah yang Diimplementasikan menjadi Kebijakan	Jumlah Inovasi Daerah yang Diimplementasikan menjadi kebijakan	BAPPEDA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Bappeda	Nilai LAKIP Bappeda Hasil Reviu Inspektorat	BAPPEDA

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	merupakan angka rata-rata hasil pembangunan bidang pendidikan	DISDIK
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	DISDIK
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	DISDIK
Meningkatnya akses dan layanan pendidikan	Persentase Rata-rata Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Rata-rata kinerja pencapaian SPM	DISDIK
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil AKIP OPD	DISDIK
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu dikali 100.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun	DINKES
	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	Jumlah kematian bayi usia 0 - 1 thn dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun	DINKES
	Prevalensi Stunting	Jumlah Balita pendek dibagi jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan x 100	DINKES
	Persentase Penderita TB yang ditemukan dan diobati	Jumlah penderita TB yang ditemukan diobati dibagi jumlah total penderita TB di wilayah pada periode tertentu x 100	DINKES

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
	Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai Standar	Cakupan ASPAK di Puskesmas	DINKES
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Jumlah 5 komponen penilaian SAKIP OPD dalam periode 1 tahun	DINKES
Meningkatkan Pemerataan Jaringan Jalan dan SDA	Indeks Pembangunan Infrastruktur		DBMSDA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik/Total Panjang Jalan Kabupaten x 100 Persen	DBMSDA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur SDA	Persentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur Sungai dan Saluran pembuang dalam kondisi baik ditambah persentase luas lahan sawah dilindungi terlayani irigasi dibagi 2	DBMSDA
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Drainase	Persentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	% Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	DBMSDA
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Nilai Sakip dan RB	DBMSDA
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan	Nilai Sakip Hasil Evaluasi	Nilai Sakip Hasil Review	DBMSDA
Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	Luas kesesuaian pemanfaatan ruang Kawasan lindung/Rencana Peruntukan Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Tangerang x 100%	DTRB
Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Luas lahan pengesahan Rencana Tapak/Rencana Peruntukan sesuai RTR x 100%	DTRB
Meningkatkan Kualitas	Persentase Penataan	Jumlah bangunan yang tertata/	DTRB

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dalam Rencana Penataan Kawasan x 100%	
Meningkatkan Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persentase Pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya	Jumlah Konstruksi Bangunan Gedung Sesuai Dengan Standar Teknis dalam PBG/Jumah PBG yang berlaku x 100%	DTRB
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	DTRB
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Nilai AKIP	DTRB
Meningkatnya layanan sub urusan kebencanaan (Tujuan)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia.	BPBD
Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana (Sasaran)	Indeks Ketahanan Daerah	instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.	BPBD
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	Evaluasi AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang	PERKIM

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman (Tujuan)	Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak (Indikator Tujuan)	Jumlah luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman layak didapat dari Jumlah Luas Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang ditangani ditambah Jumlah Luas Kawasan Layak tahun tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan bupati Nomor 050/Kep.1807-Huk/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh Luas Permukiman kumuh kabupaten Tangerang sebesar 5,465.31 Ha.	PERKIM
Tujuan 1: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah			SATPOL PP
Sasaran 1: Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh satpol pp dikali 100	SATPOL PP
Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja			SATPOL PP
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi Inspektorat Kabupaten Tangerang	SATPOL PP

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib	Indeks Ketentraman Dan Ketertiban	Pengukuran indeks dalam aspek Ketentraman Dan Ketertiban	Badan Kesbangpol
Meningkatkan kualitas manajemen dan penunjang teknis Badan Kesbangpol	Persentase Tingkat Efektifitas Kinerja	Persentase Tingkat Efektifitas Kinerja	Badan Kesbangpol
Meningkatnya Pencegahan potensi kerawanan konflik	Persentase Pencegahan potensi kerawanan konflik	Jumlah potensi kerawanan konflik sosial yang dapat dicegah dibagi Jumlah cakupan potensi kerawanan konflik sosial dikali seratus persen	Badan Kesbangpol
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Menunjukkan Nilai AKIP	Badan Kesbangpol
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang Berdaya	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar	DINSOS

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya dan terlayani. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1. (Sumber data: P3KE)	DINSOS
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	DINSOS
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja	DISNAKER
Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang Kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dari pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Tangerang	DISNAKER
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja	Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja	DISNAKER
Tujuan: Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen, Persentase Perempuan dalam Posisi Pengambilan Keputusan Ekonomi, dan Bagian Pendapatan Perempuan	DPPPA
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan	- Persentase Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	Meningkatnya Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	DPPPA
	- Persentase Peningkatan	Jumlah Perempuan yang Mendapatkan	DPPPA

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
	Partisipasi Perempuan dalam Pemberdayaan di Bidang Ekonomi	Pelatihan dibagi Jumlah Perempuan Kepala Keluarga dikali 100	
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani secara Komprehensif	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani Sesuai Standar Pelayanan dibagi Jumlah Kasus terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	DPPPA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Capaian Kategori KLA	Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha yang Terencana Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak	DPPPA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPPA	Persentase Perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja	DPPPA
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai AKIP	Nilai AKIP	DLHK
Terkendalnya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki Dokumen lingkungan Hidup	Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha dan/ Atau Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup dengan jumlah tahun Sebelumnya	DLHK
	Persentase Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap peraturan - peraturan lingkungan hidup	Perbandingan jumlah pelaku usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dengan jumlah pelaku usaha yang dilakukan Pengawasan	DLHK

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
	Persentase RTH	Persentase Penanganan Sampah Dari luasan Kabupaten/Kota	DLHK
	Persentase Penanganan Sampah	Jumlah Sampah yang ditangani berbanding dengan jumlah timbulan Sampah	DLHK
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan			DISDUKCAPIL
1. Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu:	DISUKCAPIL
		1. Kebijakan Pelayanan	
		2. Profesionalisme SDM	
		3. Sarana Prasarana	
		4. Sistem Informasi Pelayanan Publik	
		5. Konsultasi dan Pengaduan	
6. Inovasi			

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sasaran Pendukung Sasaran Strategis)	Nilai AKIP Disdukcapil (Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama)	Nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	DISDUKCAPIL
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Desa	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil survei dari Kemendes PDTT sampai dengan tahun berkenaan	DPMPD
Sasaran: Meningkatnya Desa Mandiri			
Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP DPMPD pada tahun berkenaan	DPMPD
Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja			
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	DPPKB

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	DPPKB
Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga	DPPKB
	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD yang dilaksanakan Inspektorat	DPPKB
Meningkatnya Kualitas Keluarga			DPPKB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD			DPPKB
Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$	DISHUB
	Rasio Trayek Yang Aktif	Jumlah Trayek yang aktif di bagi jumlah Total Trayek x 100 %	DISHUB
	Rasio Penanganan Kemacetan	V/C Rasio Jalan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	DISHUB
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	DISHUB

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks SPBE	Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE	DISKOMINFO
Sasaran:	Nilai Domain tata kelola SPBE	Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya	DISKOMINFO
Optimalnya tata kelola teknologi informasi		pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu	
Sasaran:	Indeks KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahir lah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DISKOMINFO
Optimalnya layanan informasi publik			

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Sasaran: Optimalnya tata kelola keamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	evaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah	DISKOMINFO
Sasaran: Optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral	Prosentase statistik sektoral	Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral melalui Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (yang didapat dari perhitungan tabel terisi/ jumlah table data sektoral x 100%)	DISKOMINFO
Sasaran: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP Perangkat Daerah	DISKOMINFO
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase Daya Saing Produk Usaha Mikro	jumlah Produk yang keluar daerah	DISKUM
Meningkatkan Kualitas UM	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya	Jumlah UM yang sudah memiliki legalitas, fasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan dibagi jumlah UM yang sudah mendapatkan Perlakuan n berjalan.	DISKUM
Meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya	Rata-rata dari Prosentase Koperasi Aktif, Koperasi yang Berkualitas dan Koperasi yang	DISKUM

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Hasil Reviu	DISKUM
Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Prosentase Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda	Prosentase Penduduk usia 16-30 tahun yang aktif dalam kegiatan organisasi dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 -30 tahun	DISPORABUDPAR
Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Prosentase Penduduk usia 16-30 tahun yang aktif dalam kegiatan organisasi dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 -30 tahun	DISPORABUDPAR
Meningkatkan Daya Saing Pemuda	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Prosentase Penduduk usia 16-30 tahun yang aktif dalam kegiatan organisasi dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 -30 tahun	DISPORABUDPAR
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Tahun (n) dikurangi jumlah wisatawan tahun (n-1) dikali 100%	DISPORABUDPAR
Meningkatnya layanan perpustakaan yang inklusif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat perhari, jumlah perpustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi anggota perpustakaan	DISPERPUSIP

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatnya tata kelola dan pengawasan kearsipan	Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis (Penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip), Sumber Daya Kearsipan (SDM Kearsipan), organisasi kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan	DISPERPUSIP
Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan		Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan & pembudidaya (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan & pembudidaya (Ib)	DISKAN
Meningkatnya Produksi Perikanan	Laju Produksi Perikanan	(Jumlah produksi perikanan tahun n dikurangi jumlah produksi tahun n-1) dibagi jumlah produksi tahun n-1 dikali 100 persen	DISKAN
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/ thn)	Jumlah Konsumsi Ikan pertahun dibagi jumlah penduduk	DISKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai Akuntabilitas kinerja yang mengidentifikasi kemampuan OPD dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian kinerja dan evaluasi internal	DISKAN
Meningkatnya Jumlah Cadangan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dibagi Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)*100	DPKP

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibagi Skor PPH Ideal (100)*100	DPKP
Meningkatnya Produksi Pertanian	Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian Tahun n - Jumlah Produksi Pertanian Tahun n - 1 dibagi Jumlah Jumlah Produksi Pertanian Tahun n - 1 *100	DPKP
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian LKIP	DPKP
Meningkatnya Jumlah Pertumbuhan IKM/Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase Jumlah pertumbuhan IKM	Jumlah IKM yang tumbuh tahun n dikurangi Jumlah IKM tahun (n-1) dibagi jumlah IKM yang tumbuh tahun n	DISPERINDAG
Meningkatnya Produk unggulan IKM siap Ekspor/Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase jumlah produk unggulan IKM Siap Ekspor	Jumlah Produk unggulan IKM siap Ekspor dibagi data produk IKM yang terdata	DISPERINDAG
Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya/Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya dibagi jumlah komoditas yang terdata	DISPERINDAG
Meningkatnya UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP/ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase potensi UTTP yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP	Jumlah UTTP pelaku usaha yang ditera/tera ulang bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi UTTP dibagi jumlah potensi UTTP	DISPERINDAG

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Daerah Sektor Unggulan			
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah/ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DISPERINDAG
Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA)	Jumlah investasi tahun evaluasi dikurangi jumlah investasi tahun sebelumnya dibagi jumlah investasi tahun sebelumnya x 100%	DPMPTSP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu:	DPMPTSP
		1. Kebijakan Pelayanan	
		2. Profesionalisme SDM	
		3. Sarana Prasarana	
		4. Sistem Informasi Pelayanan Publik	
		5. Konsultasi dan Pengaduan	
6. Inovasi			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Tigaraksa
	Nilai AKIP	Nilai SAKIP	Kecamatan Tigaraksa
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Cikupa
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Cikupa

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
kecamatan			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Cikupa
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Panongan
Sasaran: Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Panongan
Sasaran: Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Panongan
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Curug
Sasaran:			
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Curug
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Curug
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Legok
Sasaran: Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Legok

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Legok
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pasar Kemis
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pasar Kemis
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Pasar Kemis
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan			Kecamatan Balaraja
Sasaran 1: Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan	Kecamatan Balaraja
		Aparatur Negara Dan Reformasi	
		Birokrasi Republik Indonesia	
		Nomor 14 Tahun 2017 tentang	
		Pedoman Penyusunan Survei	
		Kepuasan Masyarakat tentang	
		Pedoman Penyusunan Survei	
		Kepuasan Masyarakat mencakup	
	:1. Persyaratan, 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4.		

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		Biaya/Tarif, 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan, 6. Kompetensi pelaksana, 7. Perilaku pelaksana, 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, 9. Sarana dan Prasarana.	
Sasaran 2:	Nilai AKIP	Nilai Akip yang dikeluarkan Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 berdasarkan 5 aspek penilaian kinerja:	Kecamatan Balaraja
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja		1. Perencanaan Kinerja:	
		2. Pengukuran Kinerja	
		3. Pelaporan Kinerja	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kresek
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kresek
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Kresek
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya – jumlah gangguan tahun berjalan/jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100 %	Kecamatan Kronjo
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Kronjo	Nilai AKIP Kecamatan Kronjo	Kecamatan Kronjo

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Kecamatan Kronjo	Kecamatan Kronjo
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Mauk
Sasaran:			
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Mauk
Sasaran:			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Mauk
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Rajeg
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Rajeg
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Rajeg
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sepatan
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sepatan
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Sepatan
Meningkatnya pelayanan publik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Teluknaga

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Kecamatan Teluknaga
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Cisoka
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Cisoka	Nilai AKIP	Kecamatan Cisoka
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pakuhaji
Sasaran: Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pakuhaji
Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Pakuhaji
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kosambi
Sasaran : Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kosambi
Sasaran : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Kosambi
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Pagedangan
Sasaran:	Nilai Survei Kepuasan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Masyarakat		Pagedangan
Sasaran:	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Pagedangan
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Jambe
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Jambe
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Jambe
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Jayanti
Sasaran : Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Jayanti
Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Jayanti
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kemiri
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kemiri
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Kemiri

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukadiri
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Sukadiri	Nilai AKIP	Kecamatan Sukadiri
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cisauk:	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Cisauk
a. Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (atau dapat melalui data yang tersedia melalui aplikasi Sikepo/Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online)	Kecamatan Cisauk
b. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP mencakup: 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Pelaporan Kinerja, 4. Evaluasi Kinerja, 5. Capaian Kinerja. (Hasil LHP Nilai AKIP dari Inspektorat)	Kecamatan Cisauk
Tujuan: Meningkatkan kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sepatan Timur

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
pelayanan publik kecamatan			
Sasaran: Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sepatan Timur
Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Sepatan Timur
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sindang Jaya
Terpenuhinya pelayanan publik	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Kecamatan Sindang Jaya
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kelapa Dua
Sasaran: Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kelapa Dua
Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Kelapa Dua
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Solear
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Solear

Sasaran/Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
kecamatan			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Solear
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Mekar Baru
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Mekar Baru
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Mekar Baru
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukamulya
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Sukamulya
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Sukamulya
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Gunung Kaler
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Gunung Kaler
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Kecamatan Gunung Kaler

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR